



Yayasan Universitas Islam Madura
UNIVERSITAS ISLAM MADURA (UIM)

Alamat Kampus : Jl. PP. Miftahul Ulum Bettel (1,60 km) Kabupaten Pamekasan 69351 - Prop. Jawa Timur 69351
 Telp. 234 23 9873237 - E-mail. official@uim.ac.id

JURNAL PERKULIAHAN

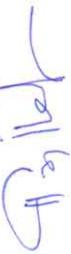
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
 Thn. Akademik / Semester : 2023/2024 Ganjil / Semester 7
 Mata Kuliah : MKP37 - OTONOMI DAERAH - SKS: 2
 Dosen Pengajar : AMINULLAH, M.H
 Ruang / Kelas / Tgl. : R-1HKM / IH01 / Sabtu, 15:20 s.d 17:00

No.	Pert.	Kenampuhan akhir pembelajaran	Kriteria, Indikator & Bobot penilaian	Waktu	Pengalaman Belajar	Tugas yang harus diselesaikan	Bahan Kajian	Referensi	Metode Pembelajaran	Jenis Pert.	Tanggal RTM
1	1	Mahasiswa mampu memahami tata aturan perkuliahan dan silabus mata kuliah yang akan diajarkan	Keaktifan, diskusi di dalam kelas, penguasaan materi dan ketepatan dalam penugasan	2 x 50 menit	Mahasiswa mendiskusikan ruang lingkup materi: a. Teori-teori desentralisasi b. Pengaturan desentralisasi c. Praktik desentralisasi	Ketepatan mahasiswa menjelaskan ruang lingkup materi: a. Teori-teori desentralisasi b. Pengaturan desentralisasi c. Praktik desentralisasi	Pembuktian kuliah, melaksanakan tentang: 1. RPP 2. Kontrak Perkuliahan 3. Standar Penilaian 4. Ruang lingkup materi: a. Teori-teori desentralisasi b. Pengaturan desentralisasi c. Praktik desentralisasi	1. Hari Sabarmo, Untiaian Pemikiran Otonomi Daerah-Mermandu Otonomi Daerah Mengja Kesatuan Bangsa, Sinar Grafiqa, Jakarta, 2008 2. Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, Alumni Bandung, 2008.	Bentuk: Kuliah Aktifitas di kelas; Metode: Ceramah dan diskusi Media: Laptop dan LCD Projector	Tatap Muka	16-09-2023
2	2	Mahasiswa mampu menjabarkan perbedaan penistabilitan dalam hukum otonomi daerah	Keaktifan, diskusi di dalam kelas, penguasaan materi dan ketepatan dalam penugasan	2 x 50 menit	Mahasiswa mendiskripsikan Pengertian: 1. Desentralisasi; 2. Dekonsentrasi; 3. Tugas Pembantuan; 4. Daerah Otonomi; 5. Otonomi Daerah	Ketepatan mahasiswa menjelaskan pengertian: 1. Desentralisasi; 2. Dekonsentrasi; 3. Tugas Pembantuan; 4. Daerah Otonomi; 5. Otonomi Daerah	Pengertian: 1. Desentralisasi; 2. Dekonsentrasi; 3. Tugas Pembantuan; 4. Daerah Otonomi; 5. Otonomi Daerah	1. Hari Sabarmo, Untiaian Pemikiran Otonomi Daerah-Mermandu Otonomi Daerah Mengja Kesatuan Bangsa, Sinar Grafiqa, Jakarta, 2008 2. Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, Alumni Bandung, 2008.	Bentuk: Kuliah Aktifitas di kelas; Metode: Ceramah dan diskusi Media: Laptop dan LCD Projector	Tatap Muka	23-09-2023
3	3	Mahasiswa mampu menjabarkan bentuk negara dan hubungan desentralisasi dalam negara kesatuan	Keaktifan, diskusi di dalam kelas, penguasaan materi dan ketepatan dalam penugasan	2 x 50 menit	Mahasiswa mendiskusikan bentuk negara: 1. Kesatuan; 2. Federasi; Mahasiswa mendiskusikan hubungan desentralisasi dalam negara kesatuan	Ketepatan menjelaskan bentuk negara: 1. Kesatuan; 2. Federasi; Ketepatan menjelaskan hubungan desentralisasi dalam negara kesatuan	Bentuk negara: 1. Kesatuan; 2. Federasi; Hubungan desentralisasi dalam negara kesatuan.	1. Hari Sabarmo, Untiaian Pemikiran Otonomi Daerah-Mermandu Otonomi Daerah Mengja Kesatuan Bangsa, Sinar Grafiqa, Jakarta, 2008 2. Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, Alumni Bandung, 2008.	Bentuk: Kuliah Aktifitas di kelas; Metode: Ceramah dan diskusi Media: Laptop dan LCD Projector	Tatap Muka	30-09-2023

No.	Pert.	Kemampuan akhir pembelajaran	Kriteria, Indikator & Bobot penilaian	Waktu	Pengalaman Belajar	Tugas yang harus diselesaikan	Bahan Kajian	Referensi	Metode Pembelajaran	Jenis Pert.	Tanggal RTM
4	4	Mahasiswa mampu menguraikan teori desentralisasi	Keaktifan, diskusi di dalam kelas, penguasan materi dan ketepatan dalam penugasan	2 x 50 menit	Mahasiswa mendiskusikan: 1. Hakikat desentralisasi; 2. Urgensi desentralisasi; 3. Nilai desentralisasi; 4. Element desentralisasi; 5. Fungsi, keuntungan, dan kelemahan desentralisasi	Ketepatan menjelaskan: 1. Hakikat desentralisasi; 2. Urgensi desentralisasi; 3. Nilai desentralisasi; 4. Element desentralisasi; 5. Fungsi, keuntungan, dan kelemahan desentralisasi	1. Hakikat desentralisasi; 2. Urgensi desentralisasi; 3. Nilai desentralisasi; 4. Element desentralisasi; 5. Fungsi, keuntungan, dan kelemahan desentralisasi	Widjaja, HW. 2011. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Rajawali Pers	Bentuk: Kuliah Aktifitas di kelas. Metode: Ceramah dan diskusi. Media: Laptop dan LCD Projector	Tatap Muka	07-10-2023
5	5	Mahasiswa mampu membedakan konsep desentralisasi di beberapa negara	Keaktifan, diskusi di dalam kelas, penguasan materi dan ketepatan dalam penugasan	2 x 50 menit	Mahasiswa mendiskusikan konsep desentralisasi di beberapa negara : 1. Inggris; 2. Perancis; 3. Belanda; 4. India; 5. Philipina	Ketepatan menjelaskan dan membedakan konsep desentralisasi di beberapa negara : 1. Inggris; 2. Perancis; 3. Belanda; 4. India; 5. Philipina	Konsep desentralisasi di beberapa negara : 1. Inggris; 2. Perancis; 3. Belanda; 4. India; 5. Philipina	Widjaja, HW. 2011. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Rajawali Pers	Bentuk: Kuliah Aktifitas di kelas. Metode: Ceramah dan diskusi. Media: Laptop dan LCD Projector	Tatap Muka	14-10-2023
6	6	Mahasiswa mampu membedakan sistem-sistem otonomi daerah	Keaktifan, diskusi di dalam kelas, penguasan materi dan ketepatan dalam penugasan	2 x 50 menit	Mahasiswa mendiskusikan: 1. Sistem otonomi material; 2. Sistem otonomi formal; 3. Sistem otonomi nyata	Ketepatan membedakan: 1. Sistem otonomi material; 2. Sistem otonomi formal; 3. Sistem otonomi nyata	1. Sistem otonomi material; 2. Sistem otonomi formal; 3. Sistem otonomi nyata.	Widjaja, HW. 2011. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Rajawali Pers	Bentuk: Kuliah Aktifitas di kelas. Metode: Ceramah dan diskusi. Media: Laptop dan LCD Projector	Tatap Muka	21-10-2023
7	7	Mahasiswa mampu menguraikan sejarah dan pengaturan desentralisasi di Indonesia	Keaktifan, diskusi di dalam kelas, penguasan materi dan ketepatan dalam penugasan	2 x 50 menit	Mahasiswa mendiskusikan sejarah dan pengaturan desentralisasi masa kemerdekaan: 1. Orde lama; 2. Orde demokrasi terpimpin; 3. Orde baru; 4. Era reformasi	Ketepatan membedakan sejarah dan pengaturan desentralisasi masa kemerdekaan: 1. Orde lama; 2. Orde demokrasi terpimpin; 3. Orde baru; 4. Era reformasi	Sejarah pengaturan desentralisasi 1. Sistem otonomi material; 2. Sistem otonomi formal; 3. Sistem otonomi nyata.	4. Houssein, Biennyamin, 2009. Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah: dari era orde baru ke era reformasi. Depok. Departemen Ilmu Administrasi, FISIP UI.	Bentuk: Kuliah Aktifitas di kelas. Metode: Ceramah dan diskusi. Media: Laptop dan LCD Projector	Tatap Muka	28-10-2023
8	8	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mahasiswa mampu menjawab soal	2 x 50 menit	Mahasiswa menjawab soal dengan benar	Ketepatan menjawab soal	UTS		Menjawab soal dengan benar	Ujian Tengah Semester (UTS)	04-11-2023
9	9	Mahasiswa mampu mengidentifikasi perkembangan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia	Keaktifan, diskusi di dalam kelas, penguasan materi dan ketepatan dalam penugasan	2 x 50 menit	Mahasiswa melakukan bedah: 1. UU nomor 1 Tahun 1945; 2. UU Nomor 22 Tahun 1948; 3. UU Nomor 1 Tahun 1957; 4. UU Nomor 18 Tahun 1965;	Ketepatan mengidentifikasi perkembangan desentralisasi di Indonesia berdasarkan: 1. UU nomor 1 Tahun 1945; 2. UU Nomor 22 Tahun 1948; 3. UU Nomor 1 Tahun 1957; 4. UU Nomor 18 Tahun 1965;	1. UU nomor 1 Tahun 1945; 2. UU Nomor 22 Tahun 1948; 3. UU Nomor 1 Tahun 1957; 4. UU Nomor 18 Tahun 1965;	Bentuk: Kuliah Aktifitas di kelas. Metode: Ceramah dan diskusi. Media: Laptop dan LCD Projector	Tatap Muka	11-11-2023	

No.	Pert.	Kenampuan akhir pembelajaran	Kriteria, Indikator & Bobot penilaian	Waktu	Pengalaman Belajar	Tugas yang harus diselesaikan	Bahan Kajian	Referensi	Metode Pembelajaran	Jenis Pert.	Tanggal RTM
10	10	Mahasiswa mampu mengidentifikasi perkembangan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia	Keaktifan, diskusi di dalam kelas, pengiasan materi dan ketepatan dalam penugasan	2 x 50 menit	mahasiswa melakukan bedah: 1. UU nomor 5 Tahun 1947; 2. UU Nomor 22 Tahun 1999; 3. UU Nomor 32 Tahun 2004; Tahun 2004; 4. UU Nomor 23 Tahun 2014/Perppu Nomor 1 Tahun 2014 (beserta perubahannya).	Ketepatan melakukan bedah: 1. UU nomor 5 Tahun 1947; 2. UU Nomor 22 Tahun 1989; 3. UU Nomor 32 Tahun 2004; 4. UU Nomor 23 Tahun 2014/Perppu Nomor 1 Tahun 2014 (beserta perubahannya).	1. UU nomor 5 Tahun 1947; 2. UU Nomor 22 Tahun 1989; 3. UU Nomor 32 Tahun 2004; 4. UU Nomor 23 Tahun 2014/Perppu Nomor 1 Tahun 2014 (beserta perubahannya).	Bentuk: Kuliah Aktifitas di kelas : Metode: Ceramah dan diskusi Media: Laptop dan LCD Projector	Tatap Muka	18-11-2023	
11	11	Mahasiswa mampu menghubungkan parameter pelaksanaan desentralisasi	Keaktifan, diskusi di dalam kelas, pengiasan materi dan ketepatan dalam penugasan	2 x 50 menit	Mahasiswa mendiskusikan parameter pelaksanaan desentralisasi	Ketepatan menjelaskan parameter pelaksanaan desentralisasi	1. Beberapa parameter; 2. Evaluasi pelaksanaan; 3. Parameter yang ideal.	Smith, Briant C. 2012. Desentralisasi, dimensi territorial suatu negara (versi bahasa Indonesia) MIPI. Jakarta.	Bentuk: Kuliah Aktifitas di kelas : Metode: Ceramah dan diskusi Media: Laptop dan LCD Projector	Tatap Muka	25-11-2023
12	12	Mahasiswa mampu menganalisis pembagian dan hubungan kewenangan pusat dan daerah	Keaktifan, diskusi di dalam kelas, pengiasan materi dan ketepatan dalam penugasan	2 x 50 menit	Mahasiswa mendiskusikan pembagian dan hubungan kewenangan pusat dan daerah	Ketepatan menjelaskan pembagian dan hubungan kewenangan pusat dan daerah	1. Pembagian kewenangan pusat dan daerah; 2. Hubungan kewenangan pusat dan daerah	Smith, Briant C. 2012. Desentralisasi, dimensi territorial suatu negara (versi bahasa Indonesia) MIPI. Jakarta.	Bentuk: Kuliah Aktifitas di kelas : Metode: Ceramah dan diskusi Media: Laptop dan LCD Projector	Tatap Muka	02-12-2023
13	13	Mahasiswa mampu membedakan produk hukum daerah/desa	Keaktifan, diskusi di dalam kelas, pengiasan materi dan ketepatan dalam penugasan	2 x 50 menit	Mahasiswa mendiskusikan perbedaan produk hukum daerah/desa	Ketepatan membedakan produk hukum daerah/desa	Produk hukum daerah/desa; 1. Peraturan Daerah; 2. Peraturan Desa.	Huda, Ni'matul. 2014. Desentralisasi. Asimetris dalam NKRI, kajian terhadap daerah istimewa, daerah khusus dan otonomi khusus, Bandung, Nusa Media	Bentuk: Kuliah Aktifitas di kelas : Metode: Ceramah dan diskusi Media: Laptop dan LCD Projector	Tatap Muka	09-12-2023
14	14	Mahasiswa mampu menganalisis penegaturan dalam pemilihan kepala daerah dalam penyelesaian sengketa Pilkada	Keaktifan, diskusi di dalam kelas, pengiasan materi dan ketepatan dalam penugasan	2 x 50 menit	Mahasiswa mendiskusikan dan menganalisis penegaturan dalam pemilihan kepala daerah dalam penyelesaian sengketa Pilkada	Ketepatan menganalisis dan penegaturan dalam pemilihan kepala daerah dalam penyelesaian sengketa Pilkada	Pengaturan pilkada; Penyelesaian sengketa pilkada	Huda, Ni'matul. 2014. Desentralisasi. Asimetris dalam NKRI, kajian terhadap daerah istimewa, daerah khusus dan otonomi khusus, Bandung, Nusa Media	Bentuk: Kuliah Aktifitas di kelas : Metode: Ceramah dan diskusi Media: Laptop dan LCD Projector	Tatap Muka	16-12-2023
15	15	Mahasiswa mampu menguraikan tugas dan fungsi kepala daerah dan DPRD	Keaktifan, diskusi di dalam kelas, pengiasan materi dan ketepatan dalam penugasan	2 x 50 menit	Mahasiswa mendiskusikan dan menguraikan tugas dan fungsi kepala daerah dan DPRD	Ketepatan mengurakan tugas dan fungsi kepala daerah dan DPRD	1. Wewenang Kepala Daerah; 2. Fungsi DPRD; dan 3. Hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan APBD.	Johan, Djohermansyah. 2014. Merajut Otonomi Daerah pada Era Reformasi (kasus Indonesia). IKAPTK.	Bentuk: Kuliah Aktifitas di kelas : Metode: Ceramah dan diskusi Media: Laptop dan LCD Projector	Tatap Muka	23-12-2023
16	16	Ujian Akhir Semester (UAS)	Mahasiswa nampu menjawab soal	2 x 50 menit	Mahasiswa menjawab soal dengan benar	Ketepatan menjawab soal	UAS	Menjawab soal dengan benar	Ujian Akhir Semester (UAS)	06-01-2024	

Pamekasan, 23 Januari 2024
Paraf Dosen Pengajar



(AMINULLAH, M.H.)
NIDN: 0718098504

